BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pelaksanaan pemilihan umum (pilkada) di Indonesia sangat ditentukan oleh kinerja para pihak penyelenggaranya (Kolang et al., 2017), termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang berperan penting di tingkat akar rumput. PPS bertanggung jawab dalam memastikan kelancaran proses pilkada di lingkungan terkecil, mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Sahila et al., 2024). Kinerja PPS menjadi krusial karena mereka adalah garda terdepan dalam pelaksanaan pilkada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pemilih (Akbar, 2024). Oleh sebab itu, semakin baik kinerja PPS, maka kredibilitas hasil pilkada secara keseluruhan, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi akan semakin meningkat.

Pelaksanaan peran penting PPS dalam memastikan kelancaran dan kejujuran pilkada seringkali mendapat tantangan-tantangan di lapangan. Berbagai faktor, seperti tekanan politik (Mardiana, 2020), keterbatasan sumber daya (Darma et al., 2024), beban kerja yang tinggi (Hurasan et al., 2021), serta keterampilan administrasi (Gorantokan, 2018), dapat memengaruhi akurasi dan transparansi proses pemungutan suara. Dalam beberapa kasus, tantangan-tantangan ini dapat menyebabkan penyimpangan kinerja yang berdampak pada legitimasi hasil pilkada (Husin et al., 2021).

Penelitian terkait kinerja penyelenggaraan pilkada akan dilakukan pada konteks lingkungan kerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng,

Kabupaten Buleleng, Bali. Dalam beberapa kesempatan, terungkap adanya praktik-praktik kinerja penyelenggara pilkada yang belum optimal di wilayah kabupaten ini. Misalnya, ditemukan adanya keteledoran pihak penyelenggara pilkada yang menyebabkan data pemilih dan perolehan suara salah satu calon legislatif tidak sesuai, sehingga jumlah suara salah satu calon naik, sementara jumlah suara untuk partai lain turun secara signifikan (detik.com). Selain itu, terdapat juga oknum penyelenggara pilkada yang memanipulasi suara saat pada proses rekapitulasi sehingga jumlah perolehan suara menjadi tidak sama dengan jumlah pemilih riil yang menggunakan hak suaranya (radarbuleleng.jawapos.com).

Lingkungan kerja para penyelenggara pilkada, termasuk petugas PPS, senantiasa diwarnai dengan tekanan dan konflik kepentingan. Hal ini dapat muncul dari berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, hingga kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu (Mardiana, 2020). Para penyelenggara pilkada seringkali kemudian harus menghadapi tantangan dalam menjaga komitmen, integritas, dan transparansi dalam setiap tahapan pilkada (Surbakti & Nugroho, 2015). Konflik kepentingan dan tekanan eksternal tersebut dapat berdampak langsung pada kinerja penyelenggaraan pilkada, mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan, serta efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka.

Komitmen memiliki peran penting dalam kinerja penyelenggara pilkada karena individu yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mampu menjaga etika, profesionalisme, serta tanggung jawab mereka dalam menghadapi tekanan dan tantangan di lapangan (Mathis & Jackson, 2019). Meyer dan Allen (1991) mengembangkan konsep tiga dimensi komitmen organisasi, yaitu komitmen afektif

(emosional terhadap pekerjaan), komitmen normatif (rasa kewajiban untuk bertahan dalam organisasi), dan komitmen berkelanjutan (pertimbangan konsekuensi jika meninggalkan organisasi). Dalam konteks PPS, komitmen afektif dapat mencerminkan motivasi mereka dalam melaksanakan tugas pilkada dengan penuh dedikasi, sedangkan komitmen normatif berperan dalam menjaga netralitas mereka dari tekanan politik.

Indikasi adanya isu terkait komitmen dan beban kerja yang tinggi juga muncul pada lingkungan kerja penyelenggara pilkada di Kabupaten Buleleng. Dilansir dari portal media pemberitaan, ditemukan adanya oknum PPS yang melakukan pelanggaran kode etik dalam bentuk keikutsertaan aktifnya pada kegiatan kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah (radarbuleleng.jawapos.com). Pada konteks yang berbeda, salah satu anggota PPS dilaporkan bahkan harus dilarikan dan dirawat di rumah sakit akibat mengalami kelelahan dalam menjalankan tugasnya di TPS (nusabali.com).

Penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara komitmen dan kinerja para penyelenggara pilkada. Sugihariyadi dan Rahardjo (2015) mengungkap bahwa komitmen yang rendah berdampak pada menurunnya kinerja penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Di sisi lain, penelitian Asyadi dan Warastuti (2022) juga menemukan adanya dualisme loyalitas Sekretariat PPS Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang berkonsekuensi pada keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja.

Penelitian terkait pengaruh beban kerja dan kinerja para penyelenggara pilkada juga telah dilakukan dengan hasil temuan yang beragam. Penelitian Alisoh (2024) pada PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Banyakan, Kediri, Jawa Timur

menemukan bahwa situasi kerja dengan beban kerja yang rendah berpengaruh positif terhadap kinerja. Di sisi lain, penelitian Afrilia (2024) mengungkap bahwa disproporsionalitas beban kerja yang dirasakan oleh anggota PPS Nagari Air Bangis, Pasaman Barat, Sumatera Barat tidak menyebabkan adanya pelanggaran integritas sebagai salah satu indikator kinerja penyelenggaraan pilkada di Indonesia.

Inkonsistensi temuan penelitian sebelumnya, dapat kemudian ditelaah dari perspektif aspek psikologis. Rasa kepercayaan diri, optimisme, harapan, dan resiliensi dalam menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan, diakui turut berperan dalam menentukan tingkat kinerja penyelenggara pilkada dalam situasi tertentu (Kamil, 2024). Dalam praktiknya, tekanan dari pihak luar, seperti partai politik dan kandidat, sering mengancam komitmen PPS, berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang netral dan transparan. Modal psikologis kemudian diyakini dapat membantu PPS menjaga integritas dan profesionalisme, memungkinkan mereka mengelola tekanan dan mempertahankan komitmen untuk meminimalkan dampak negatif pada kinerja.

Pratiwi (2024) juga menemukan bahwa kecerdasan emosional mampu meredam pengaruh negatif beban kerja terhadap kinerja PPS di Kelurahan Pungkur, Jawa Barat. Dengan demikian, dapat diprediksi bahwa dalam situasi tekanan kepentingan dan beban kerja, tingkat kinerja penyelenggara pilkada akan bervariasi tergantung dari kadar modal psikologis yang dimilikinya.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang muncul sebagai berikut.

1. Kinerja PPS sangat menentukan kredibilitas dan transparansi hasil pilkada, tetapi dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam pelaksanaan tugas mereka. Beberapa kasus menunjukkan bahwa kesalahan dalam pendataan pemilih dan perhitungan suara masih terjadi, yang mengarah pada ketidakakuratan hasil pilkada. Terdapat indikasi bahwa beberapa PPS kurang disiplin dalam menjalankan tugas administratif, seperti keterlambatan dalam pelaporan hasil pilkada.
2. PPS menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk partai politik, kandidat, dan kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Tekanan politik dapat mengganggu komitmen PPS, yang seharusnya bekerja secara netral dan profesional. Dalam beberapa kasus, ditemukan pelanggaran kode etik oleh oknum PPS yang terlibat dalam kampanye salah satu pasangan calon.
3. PPS di Kecamatan Buleleng menghadapi beban kerja yang tinggi, terutama dalam proses pendataan pemilih, pengelolaan logistik, serta penghitungan suara. Beban kerja yang tidak terkelola dengan baik berisiko menyebabkan kelelahan fisik dan mental, menurunkan produktivitas, serta meningkatkan kemungkinan terjadinya kesalahan administratif. Kasus PPS yang mengalami kelelahan hingga harus mendapatkan perawatan medis menunjukkan dampak langsung dari beban kerja yang berlebihan.
4. Komitmen PPS dalam menjalankan tugasnya masih menjadi tantangan, terutama ketika mereka menghadapi dilema antara kepentingan pribadi, tekanan

politik, dan tuntutan profesionalisme. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dualisme loyalitas dalam sekretariat PPS dapat menghambat pelaksanaan tugas, termasuk keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban kinerja.

5. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara beban kerja dan kinerja PPS. Beberapa studi menemukan bahwa beban kerja tinggi meningkatkan kinerja, sementara studi lain menunjukkan bahwa beban kerja tinggi justru menurunkan produktivitas dan akurasi. Faktor lain, seperti komitmen, modal psikologis, dan dukungan organisasi, kemungkinan menjadi variabel moderasi yang mempengaruhi hubungan antara beban kerja dan kinerja PPS.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi sebelumnya, dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada variabel yang diteliti yaitu Komitmen dan Beban Kerja sebagai variabel bebas, Modal Psikologis sebagai variabel moderasi, dan Kinerja Penyelenggaraan Pilkada sebagai variabel terikat.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh komitmen terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng?
2. Apakah terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng?

3. Apakah modal psikologis memoderasi pengaruh antara komitmen terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng?
4. Apakah modal psikologis memoderasi pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh beban kerja terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng.
3. Untuk menganalisis modal psikologis memoderasi pengaruh antara komitmen terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng.
4. Untuk menganalisis modal psikologis memoderasi pengaruh antara beban kerja terhadap kinerja PPS dan sekretariat PPS di Kecamatan Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana komitmen dan beban kerja memengaruhi kinerja dalam situasi kerja dengan tekanan tinggi, seperti pilkada, yang relevan dengan manajemen SDM. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori modal psikologis (*self-efficacy*, optimisme, harapan, dan resiliensi) sebagai faktor pemoderasi yang memengaruhi hubungan antara beban kerja dan kinerja.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KPU dan Perumus Kebijakan

   Temuan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi komisi pemilihan, termasuk KPU dan Bawaslu, tentang strategi untuk meningkatkan komitmen dan kesejahteraan mental para penyelenggara pilkada, sehingga meningkatkan kualitas pilkada secara keseluruhan. Selain itu, dengan mengidentifikasi bagaimana modal psikologis mempengaruhi kinerja, penelitian ini dapat memberikan saran praktis terkait pelatihan dan pengembangan petugas pilkada, khususnya dalam menghadapi stres, menjaga komitmen, dan meningkatkan resiliensi. Terakhir, pembuat kebijakan pilkada dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan regulasi atau pedoman yang lebih baik guna memastikan beban kerja petugas pilkada tetap terkendali, sehingga meminimalisir kesalahan akibat kelelahan kerja atau tekanan eksternal.

2. Bagi Peneliti Berikutnya

   Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut terkait peningkatan tata kelola dalam administrasi pilkada, terutama di wilayah yang menghadapi tekanan politik dan beban kerja tinggi. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi peran modal psikologis di sektor publik lainnya yang berisiko tinggi, untuk melihat apakah efek moderasi serupa terjadi di konteks lain (misalnya di sektor kesehatan atau penegakan hukum).

1.7 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari adanya ketidaksesuaian pemahaman terhadap variabel–variable yang dipergunakan, maka dipandang perlu diberikan penjelasan istilah

pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Komitmen

   Komitmen dapat diartikan sebagai tingkat keterikatan seseorang terhadap organisasi dan kesediaannya untuk berusaha mencapai tujuan organisasi tersebut

2. Beban Kerja

   Beban Kerja dalam kinerja penyelenggaraan Pilkada merujuk pada total tanggung jawab, tugas, dan aktivitas yang harus diselesaikan oleh penyelenggara pilkada dalam proses pemilihan kepala daerah. Beban kerja ini mencakup berbagai aspek, seperti administrasi, teknis, logistik, komunikasi, serta koordinasi dengan berbagai pihak, yang secara langsung memengaruhi kualitas dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada.

3. Modal Psikologis

   Adalah kumpulan sumber daya psikologis positif yang dimiliki individu atau kelompok yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja, adaptasi, dan kesejahteraan. Dalam konteks penyelenggara Pilkada, modal psikologis memainkan peran penting karena mereka bekerja di bawah tekanan tinggi dengan tantangan yang kompleks, seperti tenggat waktu yang ketat, konflik kepentingan, dan pengawasan publik.

4. Kinerja

   Istilah yang sering digunakan dalam konteks manajemen dan organisasi untuk menggambarkan hasil kerja atau prestasi yang dicapai seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.

1.8 Rencana Publikasi

Hasil penelitian ini rencananya akan di publikasikan ke Jurnal SINTA 4 atau SINTA 3 menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.